



The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education

The 2nd ICODE Proceedings

—
3-4 Desember 2019

ISBN: 978-623-94189-0-8
ISSN: 2722-9556

PROSES OTHERING PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KERATON YOGYAKARTA

Aisyah Nur Amalia

sanamelie86@gmail.com

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Othering, a label for an individual or group that is disregarded and considered different by other societies, becomes one of the anthropological theories in reading disabilities that need to be reviewed for accuracy. This is because not all who are neglected are always in an isolated or marginalized position in society. Through the case of persons with disabilities who are in the Yogyakarta Palace, this study seeks to reconsider how the accuracy of the othering theory for Palawija-Cebolan, a naming for people with disabilities in the Palace? Based on ethnographic fieldwork in the Yogyakarta Palace, this study shows that it is true that the othering process for Palawija-Cebolan meets suitability in terms of the hierarchical structure in the Palace, because of its status as working as a lower-class official, servant or servant of the palace. However, historically and cosmologically as is the belief and knowledge prevailing at the Palace, the othering label is very problematic considering that Palawija-Cebolan is highly respected, respected, and considered magic, by the king and more broadly, the Keraton environment.

Keywords: *Othering process; disability; palawija-cebolan; Keraton Yogyakarta*

Abstrak

Othering, sebuah label bagi suatu individu atau kelompok yang diliankan dan dianggap berbeda oleh masyarakat lainnya, menjadi salah satu teori antropologi dalam membaca disabilitas yang perlu ditinjau ulang keakuratannya. Hal ini lantaran tidak semua yang diliankan selalu berada dalam posisi terasingkan atau terpinggirkan di suatu masyarakat. Melalui kasus kaum disabilitas yang berada di Keraton Yogyakarta, studi ini berusaha mempertimbangkan ulang bagaimana akurasi teori *othering* bagi *Palawija-Cebolan*, suatu penamaan bagi kaum disabilitas Keraton? Berdasarkan kerja lapangan etnografi di Keraton Yogyakarta, studi ini menunjukkan bahwa memang benar jika proses *othering* bagi *Palawija-Cebolan* menemui kesesuaian dari sisi struktur hierarki di Keraton, sebab statusnya bekerja sebagai pejabat golongan rendah, pelayan atau abdi dalem. Namun demikian, secara historis dan kosmologis sebagaimana kepercayaan dan pengetahuan yang berlaku di Keraton, label *othering* sangat problematik mengingat *Palawija-Cebolan* sangat diagungkan, dihormati, dan dianggap sakti, oleh raja dan lebih luasnya, lingkungan Keraton.

Kata kunci: Proses *Othering*; disabilitas; *Palawija-Cebolan*; keraton Yogyakarta

A. Pendahuluan

Antropologi dan disabilitas seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Antropologi menjelaskan bagaimana manusia memaknai dirinya sebagai subjek budaya yang menghasilkan kebudayaan, menjadi atribut umum kelompok manusia tertentu, disetujui dan dimaknai bersama. Dua tujuan konsep antropologi budaya adalah mendeskripsikan suatu konsepsi yang berada pada kelompok masyarakat seperti kepercayaan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam artefak, objek dan instrumen. Selanjutnya, menjelaskan konsepsi simbolik, seperti pola dalam membaca makna yang terkandung dalam tindakan, ucapan, petuah-petuah kebajikan yang dikomunikasikan lewat tradisi oral satu orang dengan yang lainnya (Kasnitz dkk, 2001, h. 3).

Dalam kajian antropologi, disabilitas masih diasosiasikan dengan *other*, seseorang yang dianggap berbeda atau lian. Menurut Hegel, *other* cenderung dikaitkan dengan sesuatu yang tidak penting, negatif dan mereka adalah *not self* (Brons, 2015, h. 70). Mead lebih merujuk pada keadaan seseorang dengan keterasingan. Di mana keadaan terasing tersebut didasarkan pada pengalaman dan aktivitas sosial yang memberikan standarisasi tentang kebagusan (Mead, 1967, h. 199). Sedangkan, Yeh (2012) menggunakan pendapat Kumashiro (2000) dalam mendefinisikan konsep *other*, yakni kelompok yang secara tradisional termarginalkan dari masyarakat. Misalnya, kelompok yang dianggap berbeda secara norma, berbeda warna kulit, kelompok pengangguran, dan kelompok yang dianggap aneh (gay, lesbi, disabilitas dan sebagainya). Kemudian Yeh memperluas definisi *othering* dengan pengalaman pribadi, sosial, budaya dan sejarah yang melibatkan: a) ambiguitas ras dan budaya; b)

kategorisasi dan *labeling*; c) dinamika kekuatan hierarkis dan d) akses terbatas ke sumber daya (Yeh dan Borero, 2012, h. 3). Yeh menggunakan empat proses *othering* tersebut pada penelitiannya yang menjelaskan keadaan murid-murid *Native Hawaiians* di sebuah sekolah urban di Hawai. Merujuk pada empat karakteristik pengalaman menurut Yeh, studi ini mencoba menggambarkan lebih lanjut apakah proses-proses *othering* tersebut berlaku juga pada disabilitas di Keraton Yogyakarta.

Teori tentang *othering* tidak hanya menjadi dasar kajian antropologi, akan tetapi juga psikologi dan sosiologi (Yeh dan Borero, 2013, h. 3). Meminjam konsepsi *othering* yang telah dijelaskan di atas, peminggiran disabilitas disertai dengan praktik standarisasi tentang kebagusan, terus menerus dilanggengkan di berbagai negara. Standar mengenai kebagusan berimbas pada stigma disabilitas yang sarat dengan ketidakmampuan, padahal secara sosial mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Mengikuti Zola dalam penelitian Maftuhin, sebuah istilah untuk menyebut disabilitas memiliki pengaruh terhadap konotasi, asosiasi dan generalisasi. Konotasi dan asosiasi pada orang yang disebut gila misalnya, memberikan pemahaman bahwa seluruh tindakan orang gila tidak perlu diperhatikan. Sedangkan generalisasi terjadi ketika memahami *blind* dan *low vision* yang diartikan sama-sama tidak dapat melihat sama sekali, padahal pada *low vision* sisa-sisa penglihatan masih ada (Maftuhin, 2016, h. 165). Dari pemahaman tersebut, kita dapati bahwa betapa buruknya dampak dari *othering* bagi disabilitas.

Di bawah ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan dan menunjukkan hasil bahwa masih banyak paradigma *the cult of normalcy*. Seperti halnya konstruksi mengenai kesempurnaan tubuh manusia di Yunani dan Romawi Kuno. Masyarakat Yunani Kuno, terbiasa memisahkan antara bayi-bayi baru lahir yang sehat dan disabilitas. Bayi-bayi yang dinilai memiliki kekurangan (disabilitas) akan ditempatkan pada *apothetai* (*the place of exposure*) dan dibiarkan sampai meninggal. Begitu pula kebiasaan pada masyarakat Romawi yang kerap membunuh bayi-bayi disabilitas dengan cara dihanyutkan ke Sungai Tiber (Ro'fah, 2015, h. 140).

Tidak berhenti pada konstruksi mengenai kesempurnaan tubuh, politisasi disabilitas juga tumbuh di Yunani dan Romawi Kuno. Masyarakat meliankan disabilitas dengan cara mengeksploitasi mereka sebagai bahan lelucon dan hiburan. Barnes and Mercer memaparkan bahwa keberadaan orang kerdil (*dwarf*), tuna wicara, bungkuk dan disabilitas fisik lainnya banyak diberikan tugas sebagai pelawak istana, memberi hiburan di pesta makan

malam, bahkan pemain dalam sirkus, karnaval dan pekan raya desa (Barnes dan Mercer, 2003, h. 91). Disabilitas sering kali terjebak dalam berbagai stereotip seperti bahan lelucon, objek inspirasi, objek rasa kasihan atau makhluk aseksual. Mereka jarang ditampilkan sebagai manusia utuh yang memiliki karakter dalam berkehidupan sosial. Disabilitas sebagai sumber lelucon (sirkus) ditunjukkan melalui peran Joseph Merrick dalam *The Elephant Man* (Ablon, 1995) dan aktor-aktor disabilitas dalam *The Greatest Showman* (Sayekti, 2018). Disabilitas dwarfisme yang secara umum, dalam dunia hiburan identik dengan komedi, dongeng (Pritchard, 2017, h. 80-97), pertanda kemurnian dan keriangian (Shakespeare dkk, 2010, h. 19-31). Misalnya dalam kisah *Snow White and Seven Dwarfs* juga serial *Tuyul* dan *Mbak Yul*.

Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa proses *othering* disabilitas juga terjadi di Songye, Afrika. Masyarakat Songye, Afrika cenderung menempatkan disabilitas dalam status liminal. Terkadang mereka dianggap sebagai anugerah, karena memiliki kekuatan supranatural. Sedangkan di sisi lain, dianggap sebagai sekutu penyihir dan juga akibat dari pelanggaran ritual (*sex taboo and food taboo*) (Ingstad dan Whyte, 1995, h. 102). Tentunya hal tersebut menjadikan ambiguitas peranan dan fungsi disabilitas di lingkungan sosial, serta berdampak terhadap respon negatif masyarakat Songye.

Berbeda dengan narasi-narasi yang ada, pada Keraton Yogyakarta, disabilitas justru mendapatkan penghormatan dan memiliki peranan yang penting. Sebagaimana penjelasan Thohari dalam tesisnya, disabilitas di Jawa memiliki eksistensi sejak diperkenalkannya wayang melalui sosok Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Mereka disegani dan dianggap sakti.

Hanya saja, Thohari kurang berfokus dalam mengemukakan keberadaan dan dinamika disabilitas di Keraton Yogyakarta. Ia lebih menggambarkan secara umum bahwa konstruksi disabilitas diwakili oleh empat konsep besar, seperti tradisional Jawa yang menganggap disabilitas sakti; konsep Islam dengan karitasnya; konsep konstruksi sosial dan medis yang lekat dengan abnormalitas. Di mana terjadinya ke empat konsep tersebut didasari oleh pergumulan tradisi, mitologi, modernitas dan ekspresi keislaman yang bercampur menjadi satu di Yogyakarta. (Thohari, 2013). Dari sini, penulis melihat masih ada celah kosong yang perlu diisi dengan kebaruan data tentang *Palawija-Cebolan*, seorang yang sakti di lingkungan keraton.

Dalam sejarah panjang Keraton Jawa, sebelum terpecah menjadi kasultanan dan kasunanan, konsep dwarfisme dan disabilitas fisik lainnya seperti bungkuk, jangkung serta

albino sudah muncul sejak abad ke-9 pada prasasti dan pahatan relief candi. Mereka dijuluki punakawan *palawija* yang bertugas sebagai pengiring dan pendamping setia golongan keraton.

Mereka juga diabadikan dalam karya sastra. Misalnya dalam Wedatama, karya-karya sastra masa Yasadipura abad ke-18 di Surakarta. Juga dalam Serat Gandakusuma yang berbentuk tembung macapat. Dalam serat tersebut diceritakan mengenai perjalanan Raden Gandakusuma dalam merebut kembali kerajaannya yang diduduki oleh “pihak kafir”. Ia dibantu oleh seorang perempuan yang kelak akan menjadi istrinya, bernama Dewi Sarirasa. Dalam rayuan yang terlontar kepada Dewi Sarirasa, terdapat istilah abdi dalem *palawija*, sebagai berikut: “Berdiamlah di dalam istana, Kanda sangat suka padamu. Aku rela menjadi abdi *palawija* atau begundal sekalipun.” Pada kata *palawija* dan *begundal*, keduanya sama-sama digunakan sebagai simbol kesetiaan dan cinta, namun *palawija* lebih bermakna pelayang yang positif dan terhormat daripada kata yang kedua, *begundal*.

Berdasarkan keistimewaan posisi disabilitas di keraton yang telah disebutkan di atas. Perlu analisis lanjutan untuk menjawab pertanyaan bagaimana keakuratan teori *othering* dalam mengonstruksikan disabilitas di Jawa sesuai dengan konteks keberadaan dan fungsi disabilitas di Keraton Yogyakarta.

Penulisan artikel ini merupakan hasil dari penelitian etnografi di Keraton Yogyakarta sepanjang bulan Februari sampai dengan Juni 2019. Metode pengumpulan data menggunakan triangulasi data (dokumentasi, observasi dan wawancara). Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari naskah dan foto baik yang berada di perpustakaan keraton (widayabudaya) secara langsung maupun yang berada di luar keraton. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan ikut serta dalam kegiatan Keraton Yogyakarta. Sedangkan wawancara dilakukan kepada seorang abdi dalem *palawija* albino, 3 orang Kanjeng yang membawahi 3 kantor dalam keraton (*tepas dwara pura*, *tepas widya budaya*, dan *tepas darah dalem*), juga seorang abdi dalem lainnya.

B. Teori *Othering*

Other atau *liyan* adalah penamaan bagi sekelompok orang yang dianggap minoritas atau berbeda dari kelompok pada umumnya. Ukuran perbedaan dalam mendefinisikan *other* didasarkan pada norma, nilai dan standar yang berlaku di masyarakat. Misalnya standar kulit putih di Amerika, standar gen-gen yang kuat di Romawi dan Yunani, serta standar-standar

lain yang diterapkan pada suatu wilayah tertentu. Termasuk standar normal dan tidak normalnya seseorang. Adanya label-label *other* yang berlaku di masyarakat ini menyebabkan tumbuhnya rasa mayoritas golongan yang mendeskreditkan 'orang yang dianggap berbeda', hingga terjadi peminggiran dari lingkungan sosial.

Brons mencontohkan sentimental lawan bicaranya yang melabeli seorang Atheis dengan amoral. Padahal seorang Ateis belum tentu tidak bermoral. Orang tersebut masih mendasarkan dengan silogisme sebagai berikut: a) orang yang bermoral adalah orang yang memiliki kepercayaan beragama; b) Atheis tidak memiliki kepercayaan beragama; c) jadi, Atheis adalah orang yang tidak bermoral (Lajos Brons, 2015, h. 71). Begitu pula pada disabilitas, paradigma yang masih mendasarkan disabilitas dengan *disable* atau orang yang tidak mampu akan menumbuh suburkan praktik-praktik *othering*. Berbeda halnya ketika paradigma ketidakmampuan disabilitas diubah menjadi kemampuan yang berbeda (*different ability*), ini akan melahirkan pemahaman inklusif bahwa kita sama-sama bisa berjalan meski menggunakan alat yang berbeda, saya menggunakan kaki dan kamu menggunakan tongkat atau kursi roda.

Kembali pada teori *other*, mulanya gagasan tersebut diperkenalkan oleh De Beauvoir's (1949) sebagai konstruksi yang berlawanan dengan *self* (kondisi pada umumnya). The other, *othering* dan *otherness* mengakar pada penelitian tentang ilmu keperawatan dan geografi budaya. Meskipun diperkenalkan oleh Beauvoir, dia mengakui bahwa gagasan tentang *other* ini bukanlah sesuatu yang baru. Dia banyak dipengaruhi oleh buku Hegel yang berjudul Master-Slave Dialectic (1807 B.IV.A). Di mana dalam buku tersebut dibahas tentang dialektika identifikasi dan perbedaan dalam perjumpaan *self* dan *other* (Lajos Brons, 2015, h. 69).

Konsep *othering* dibangun dengan tujuan sosiopolitik. Seperti yang telah sedikit disinggung pada pendahuluan, *othering* adalah suatu kelompok yang secara tradisional termarginalkan dari masyarakat. Yeh dan Borrero menggambarkan bahwa seseorang yang diliankan mengalami ambiguitas ras dan budaya; kategorisasi dan labeling; dinamika kekuatan hierarkis; dan limit atau terbatasnya akses ke sumber daya.

1. Ambiguitas Ras dan Budaya

Ambiguitas ras dan budaya dimaksudkan dengan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami ketidakjelasan identitas. Ketika etnis minoritas diliankan, mereka dilabeli dengan orang yang berbeda dari norma, mereka disatukan sebagai sebuah kelompok, dan

kompleksitas atau keragaman identitas mereka tidak sepenuhnya terwujud. Ambiguitas budaya adalah dilema konseptual. Individu yang dianggap stabil (*self*) diprioritaskan dan dihargai, sedangkan individu atau kelompok yang dianggap memiliki identitas ganda, atau ambigu sering ditafsirkan tidak memiliki identitas etnis sama sekali (Yeh dan Borero, 2012, h. 4).

2. Kategorisasi dan Labeling

Melalui penelitian yang dilakukan Yeh dan Borrero tentang murid-murid *Native Hawaiians* di sebuah sekolah urban, kategorisasi ditunjukkan melalui adanya klasifikasi-klasifikasi etnis tertentu. Contohnya pada tahun 1990, Office Management and Budget (OMB) di Hawaii membangun the Statistical Policy Directive 15 yang meletakkan lima kategori etnis seperti “white, black, Asian/Pacific Islander, American Indian/Alaskan Native, and Hispanic” (Putih, hitam, Kepulauan Asia / Pasifik, Indian Amerika / Alaska Asli, dan Hispanik). Kemudian pada 1997 the Statistical Policy Directive 15 merevisi klasifikasi yang sebelumnya hanya menjadi “Asian” and “Native Hawaiian and Other Pacific Islander” (“Asia” dan “Penduduk Asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik Lainnya”) (Yeh dan Borero, 2012, h. 5).

Setelah kategorisasi tersebut, *Native Hawaiians* masih mendapatkan label dalam sebuah sekolah urban di Honolulu. Sekolah menjadi tempat di mana para siswanya disalahkan dan memiliki label seperti *gifted* (anak super), memiliki kebutuhan khusus dan menjadi penyebab masalah. Label inilah yang kemudian memisahkan siswa-siswa menjadi dua grup yakni normal dan *other*.

3. Dinamika Kekuatan Hierarkis

Adanya dua kubu *self* dan *other*, seperti kulit putih *versus* kulit hitam dan *insider versus outsider*, melahirkan struktur dan kekuatan hierarki dalam tatanan sosial. Di mana yang dianggap lebih minor tentunya diletakkan pada susunan di bawah kelompok yang mayor.

4. Limitnya Akses ke Sumber Daya

Setelah mengalami ketidakjelasan posisi, kategorisasi dan label negatif, kemudian struktur hierarki yang menempatkan *other* di bawah dari siswa mayoritas, imbas yang terakhir adalah terbatasnya akses ekonomi, pendidikan, struktural dan kebutuhan sosial bagi *Native Hawaiians*. Secara otomatis mereka termarginalkan dari pendidikan di sekolah tersebut (Yeh dan Borero, 2012, h. 6).

Keempat tahapan yang menjadi proses *othering* atau peminggiran kaum minoritas di atas, akan ditelusuri lebih jauh apakah terjadi juga pada disabilitas yang dianggap minor atau tidak. Tentunya dalam konteks disabilitas di Keraton Yogyakarta.

C. Kosmologi Jawa tentang Disabilitas

Dalam kosmologi, orang Jawa mempercayai bahwa eksistensi manusia memiliki kaitan dengan struktur, hubungan ruang dan waktu dalam alam semesta. Pemahaman mengenai penciptaan alam semesta sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Raja dianggap sebagai salah satu elemen dalam penciptaan alam semesta yang mewakili pusat kosmis sekaligus mistis. Orang Jawa mengenal proses *cakra manggilingan* yakni sebuah konsep hidup yang diambil dari senjata Prabu Kresna, Raja dari Dwarawati. Konsep ini menanamkan bahwa hidup tergantung pada *dalane waskitha saka niteni*, berarti segala sesuatu yang terjadi pada esok hari tergantung pada pengamatan yang tekun dan teliti di hari ini. Konsep tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam kosmis Jawa yang lebih luas, dikenal dengan *kiblat papat* (kiblat empat) dalam alam kosmis atas dan bawah. Alam kosmis atas dan bawah tersebut meliputi *begja-cilaka* (beruntung-rugi), *susah-bungah* (menderita-bahagia), *bapa akasa-ibu pertiwi* (langit adalah ayah dan bumi adalah ibu), dan seterusnya. Semuanya berpasangan antara atas dan bawah yang mewakili simbol baik maupun buruk. Inilah mengapa dalam masyarakat Jawa kuno juga dikenal semboyan *urip iku mung saderma* yang berarti nasib manusia sudah ditentukan oleh Tuhan (Endraswara, 2015 h. 110). Pandangan kosmologi Jawa mengenai penciptaan manusia yang telah dijabarkan di atas, seringkali menjadikan orang-orang Jawa sebagai orang yang *nerimo* (menerima ketetapan Tuhan) dan cenderung tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Namun juga menyebabkan adanya pemahaman antara manusia biasa dan manusia sakti sebagai konsekuensi atas pembagian elemen kosmis atas dan bawah. Sebagaimana adanya *Palawija-Cebolan* yang sakti.

Kosmologi Jawa yang telah disebutkan di atas berfungsi juga dalam membaca realitas disabilitas seseorang. Beberapa narasi budaya yang hadir atas disabilitas mengatakan bahwa kondisi disabilitas merupakan karma dari perbuatan di masa lalu (Ro'fah, 2015, h. 140), yang apabila dianalisis sangat sesuai dengan semboyan *dalane waskitha saka niteni*. Kemudian, adanya kepercayaan terhadap kiblat papat yang mewakili elemen positif dan negatif. Elemen positif diwakili oleh *self* (normal) dan negatif diwakili oleh *other* (disabilitas). Dalam

pewayangan, positif digambarkan sebagai Pandawa dan negatif digambarkan sebagai Kurawa.

Meskipun demikian, elemen negatif di dalam kepercayaan masyarakat Jawa tidak selalu bermakna negatif. Bahkan keberadaan elemen negatif (dalam hal ini disabilitas) justru mendominasi kisah-kisah pewayangan. Misalnya, Semar, Petruk, Gareng dan Bagong. Gareng yang “pincang”, Petruk yang “dungu”, Bagong yang gendut dan bermulut lebar, atau Semar yang bungkuk dan bermuka jelek, mereka adalah disabilitas fisik, namun dianggap penting dalam kisah pewayangan. Mereka mampu memberikan petuah bijak yang dipercayai banyak orang bahkan menjadi pemimpin. Contohnya pada cerita Petruk Dadi Ratu (Petruk Menjadi Raja) (Slamet Thohari, 2012, h. 3).

Uniknya lagi, stereotip masyarakat dalam mengenal punakawan Semar, Gareng, Petruk dan Bagong tidak didasarkan pada kondisi fisik yang mereka punyai. Justru mereka sangat dikenal melalui kesaktiannya. Bahkan masyarakat Jawa awam (luar keraton), hampir tidak menyadari bahwa keempat punakawan tersebut adalah disabilitas. Keutuhan karakter disabilitas dalam budaya Jawa melalui lakon punakawan inilah yang menunjukkan eksistensi dan penghargaan terhadap disabilitas di lingkungan sosial.

D. Sejarah Penyandang Disabilitas dalam Keraton Yogyakarta

Cerita tentang disabilitas pada Keraton Jawa yang dikenal dengan *palawija-cebolan*, ditemukan paling awal melalui kisah Sultan Trenggono. Tepatnya, pada saat Portugis datang menguasai Jawa di tahun 1522. Ketika itu, Sultan Trenggono (Raja Demak terakhir) sedang melakukan ekspansi ke Banyuwangi. Beliau melakukan ekspansi ditemani oleh pasukan-pasukan kerajaan, termasuk abdi dalem *palawija* di dalamnya. Ada sebuah aturan ketika membawa abdi dalem *palawija* turut serta dalam perjalanan, yakni seorang Raja tidak boleh memegang kepala *palawija*. Apabila dilanggar, pantangan itu dipercaya dapat membawa malapetaka. Singkat cerita, Sultan Trenggono melanggar aturan tersebut dan akibatnya beliau terbunuh di tangan *palawija-cebolan*. Setelah cerita itu terdengar, akhirnya para Raja-Raja Jawa memuliakan *palawija* dengan cara selalu memelihara dan merawat mereka di Istana. Mereka dikelompokkan dan ditempatkan pada posisi-posisi tertentu di Keraton. Kemudian juga dilibatkan pada saat upacara, dengan posisi duduk di dekat Raja. Bagi Raja, memelihara *palawija* merupakan simbol dari kekuatan (Kanjeng Darya, wawancara, 15 Februari 2019).

Selain sakti dan merupakan simbol dari kekuatan Raja, *palawija* dianggap sebagai tameng untuk melawan penjajahan. Pemahaman ini berangkat dari masa kolonialisme. Di mana pada masa tersebut, rakyat Jawa memiliki cita-cita terlepas dari penjajahan. Sehingga, apapun yang dipercaya dapat melepaskan dari belenggu penjajahan akan dilakukan oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Termasuk mempercayai bahwa kesaktian *palawija* dapat mengusir musuh. *Palawija* memiliki posisi duduk tersendiri ketika perang melawan penjajah. Mereka duduk di samping Raja atau di barisan paling depan, berhadapan langsung dengan musuh. Dalam duduknya, mereka juga melantunkan doa-doa. Hal ini bertujuan agar Raja berhasil menaklukkan perang, sehingga mereka mengalami kemenangan (Kanjeng Suryo, wawancara, 21 Oktober 2018).

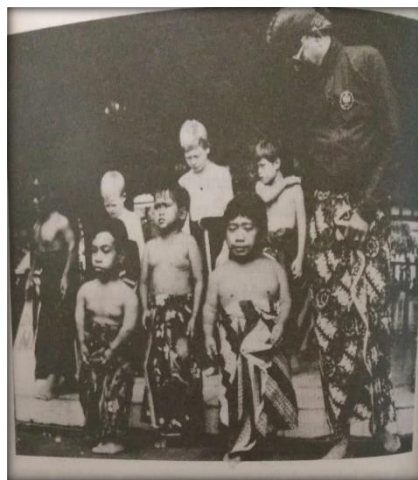
Setelah perang berakhir dan penjajah pergi dari tanah Jawa, konstruksi *palawija* di Keraton Yogyakarta menjadi ganda. Kanjeng Suryo dan Soelarto (Soelarto, 1993, h. 85-87) dalam bukunya mengatakan bahwa, Raja memelihara *palawija* bukan atas dasar kepercayaan mistis semata, melainkan atas dasar hak *palawija* sebagai warga negara dan kewajiban Raja sebagai kepala negara. Hal ini terjadi pada tahun 1900-an, saat Keraton Yogyakarta masih menjadi sebuah tatanan negara tersendiri dan belum bergabung dengan Indonesia. Sebagai warga negara, *palawija* memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya dengan cara melaksanakan tugas-tugas yang ada di Keraton Yogyakarta. Tentunya, tugas-tugas yang dibebankan, disesuaikan dengan potensi *palawija*.

Sedangkan Keraton memiliki kewajiban untuk mengayomi dan memberikan upah yang setara dengan kemampuannya. Menurut Kanjeng Suryo, pada zaman dahulu pemberian upah kepada *palawija* justru lebih besar daripada abdi dalem yang lainnya. Hal ini dikarenakan Sultan menghargai kesaktian *palawija* yang tidak dimiliki oleh abdi dalem yang lainnya. Mereka juga mendapatkan *papan lungguh* atau tanah beserta rumah gratis yang bisa dipakai sampai anak cucu mereka habis, namun dengan syarat tidak boleh dijual dan hanya menjadi hak pakai saja (Kanjeng Suryo, wawancara, 21 Oktober 2018).

Palawija banyak dilibatkan pada perayaan-perayaan keraton seperti upacara adat, Garebeg Maulud, Garebeg Dal, pengukuhan Sultan dan lain sebagainya. Keberadaan *palawija* pada prosesi budaya merupakan suatu kesakralan dan simbol energi bagi Raja (Kanjeng Darya, wawancara, 15 Februari 2019). Pada perarakan setiap garebeg, mereka turut serta dan memberikan nuansa tersendiri. Para abdi dalem *palawija-cebolan* ini berjalan tepat beberapa langkah di belakang putra mahkota. Jika belum ada putra mahkota, maka mereka

berada di belakang pangeran yang tertua. Mereka berjalan dan bergandengan tangan dengan residen. Juga otomatis berada beberapa langkah di depan para manggung yang membawa benda-benda upacara kerajaan. Sehingga keberadaannya tepat di belakang putra mahkota dan di depan para prajurit yang membawa perlengkapan upacara kerajaan.

Begitu pula dengan pakaian yang mereka kenakan sudah diatur oleh Keraton, yakni khusus menggunakan busana seragam berupa kain merah berhiaskan bunga-bunga, dengan ikat pinggang yang besar, bertelanjang dada, tanpa penutup kepala serta rambutnya dihias dengan bulu-bulu dan suntingan bunga-bunga. Adapun penempatan berjalan *palawija* di belakang putra mahkota memiliki makna untuk mengingatkan agar apabila putra mahkota telah menjadi sultan, hendaknya jangan lupa untuk memperhatikan kesejahteraan para kawula kerajaan yang 'cacat tubuh'. Abdi dalem *palawija-cebolan* adalah lambang hidup yang mengandung perlambang kebajikan sultan. Bahwa para kawula kerajaan yang memiliki 'cacat tubuh' juga berhak memperoleh naungan kasih sayang sultan, dan menunjukkan bahwa mereka yang memiliki 'cacat tubuh' pun dapat memberikan pengabdian kepada negara sesuai dengan potensi yang dimiliki.



Gambar 3. Proses Jumenengan Dalem Tahun 1989 (Soelarto, 1993)

Jika dikaitkan pada kepercayaan, *palawija* erat kaitannya dengan kekuatan magis atau supranatural yang menambah kekuatan gaib raja atau calon raja. Pada Pasowan Garebeg, mereka duduk bersila tidak jauh dari tempat duduk sultan di Bangsal Manguntur Tangkil (Soelarto, 1993, h. 85-87). Gambaran pengukuhan Sultan (Jumenengan Dalem) Hamengku Buwono ke-X dengan beberapa disabilitas yang ditugaskan sebagai abdi dalem *palawija-cebolan* selama prosesi tersebut terdokumentasikan dalam buku Soelarto, 1993 seperti terlihat di Gambar 3):

Selain dokumentasi pengukuhan Sri Sultan Hamengku Buwono ke X dalam buku tersebut, di bawah ini juga merupakan potret yang terekam pada Jumenengan Dalem tahun 1989. Di mana abdi dalem *palawija-cebolan* berjalan di depan manggung kerajaan dan duduk di barisan depan pada saat prosesi.



Gambar 4 Prosesi *Jumenengan Dalem*

Apabila ditarik mundur, Pangeran Diponegoro juga memiliki abdi dalem *punokawan* bernama Banteng Wareng dan Joyo Suroto. Kedua abdi *punokawan* muda tersebut selalu menemani Pangeran Diponegoro dalam keadaan senang maupun susah. Mereka adalah teman setia dalam perjalanan gerilya Pangeran Diponegoro. Bahkan saat beliau tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Makassar, mereka tetap menemani (Peter Carey, 2014, h. 71). Banteng Wareng terkenal dengan bocah *ndhugal*, bandel lagi *katik* (cebol) tubuhnya sedangkan Joyo Suroto terkenal humoris dan selalu menghibur Pangeran Diponegoro.

Dalam lukisan Raden Saleh yang direproduksi dari lukisan Nicolaas Pieneman, berjudul “Penangkapan Pangeran Diponegoro” atau *Gevangename van Prins Diponegoro* (sekitar tahun 1857). Lukisan ini menceritakan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Di belakang istri Pangeran Diponegoro terlihat abdi *punokawan*, Joyo Suroto. Raden Saleh menggambarkan sosok Pangeran Diponegoro dengan sikap mantap menentang pihak kolonial.

Adapun penggambaran Banteng Wareng dalam lukisan lain termuat dalam Babad Kedung Kebo. Banteng Wareng digambarkan berdiri di depan Pangeran Diponegoro, dengan

tubuh yang kecil. Digambarkan pula seseorang yang sedang duduk adalah putra Pangeran Diponegoro, Alibasah dan dibelakang istri dari Pangeran Diponegoro, Raden Ayu.

Tidak hanya di lingkungan keraton, para bupati di Jawa dan Sunda juga memiliki abdi dalem *palawija*. Mereka bertugas memegang payung *sungsungan* dan terlibat dalam prosesi-prosesi sakral, seperti pernikahan anak perempuan seorang bupati. Sejarah merekam keberadaan abdi dalem *palawija* tersebut baik di Keraton Priangan atau Sunda (Preanger Bruidspaar) dan di kediaman bupati Jawa. Hal ini dibuktikan dengan berbagai lukisan yang menggambarkan keberadaan abdi dalem *palawija* dalam berbagai aktivitas keraton.

Dari penelusuran sejarah yang telah dilakukan, keberadaan *palawija* sebagai seorang abdi dalem-sakti sudah ada secara turun temurun. Mereka terlibat dalam prosesi-prosesi sakral, maupun berbaur dalam aktivitas sosial dan keseharian di lingkungan keraton. Hasil observasi yang dilakukan, sejauh ini jumlah *Palawija-Cebolan* di keraton hanya tinggal beberapa orang saja. Mereka lebih banyak bertugas sebagai abdi dalem dengan tugas-tugas secara umum.

E. Proses *Othering* pada Disabilitas di Keraton Jawa

Mengikuti definisi *othering* dalam penelitian Yeh dan Borerro, karakteristik seperti ambiguitas ras dan budaya; kategorisasi dan labeling; dinamika kekuatan hierarkis; dan limit atau terbatasnya akses ke sumber daya tidak semuanya dialami oleh *Palawija-Cebolan*. Melalui proses triangulasi data terhadap sisi historis dan kosmologis sebagaimana kepercayaan dan pengetahuan yang berlaku di Keraton, *Palawija-Cebolan* sangat diagungkan, dihormati, dan dianggap sakti, oleh raja beserta warga keraton.

Hal tersebut ditunjukkan melalui turun temurunnya kepercayaan tentang kesaktian *Palawija-Cebolan* dan langgengnya praktik merawat mereka sebagai simbol kekuatan raja. Bahkan kepercayaan tersebut jauh lebih dahulu ada daripada terbentuknya Keraton Yogyakarta dan digambarkan secara positif melalui relief candi serta karya sastra.

Meskipun secara hierarki proses *othering*, *Palawija-Cebolan* memang menempati tatanan terendah di keraton, yakni sebagai abdi dalem. Namun, posisi mereka sama, bahkan bisa naik pangkat sewaktu-waktu berdasarkan dengan kinerja dan lamanya masa pengabdian. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Romo Ranjana, seorang abdi dalem *palawija* (albino) di lingkungan keraton, beliau menuturkan bahwa keraton telah memberikan kenyamanan secara sosial dibandingkan dengan tinggal di lingkungan luar

keraton. Dengan transkrip sebagai berikut, “kalau di sini kan suasananya lebih tenang, kalo malam, terus bergaulnya masyarakat itu lain masyarakat di luar daripada masyarakat di sini” Di dalam keraton mereka semua dianggap sama dengan tugas-tugas yang disesuaikan dengan kemampuannya. Tidak ada penolakan ataupun peminggiran sama sekali, bahkan seluruh kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama (gotong royong) (Romo Ranjana, wawancara, 02 Juni 2019).

Mereka juga membiasakan berbahasa yang halus dengan sesama, yakni Bahasa Bagongan dan menyebut sesama abdi dalem dengan sebutan *kanca* yang berarti teman atau saudara. Abdi dalem *palawija* dan abdi dalem yang lain selalu optimis dalam menjalani hidup. Bagi mereka, menjadi abdi dalem bukanlah hal yang hina, karena justru merasa sangat dimanusiakan dan damai tinggal di keraton (Observasi, 02 Juni 2019). Sikap hidup yang tertanam pada diri abdi dalem merupakan prinsip yang diajarkan oleh pendiri Keraton Yogyakarta (Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengku Buwono ke I). Prinsip tersebut dikenal dengan nama *Credo Watak Satriya* yang terdiri dari:

- a. *Nyawiji* atau perasaan total, fokus dan selalu berserah diri kepada Tuhan
- b. *Greget* atau penuh penghayatan dan penjiwaan
- c. *Sungguh* atau percaya diri
- d. serta *Ora Mingkuh* atau tidak gentar menghadapi ujian dan hambatan.

Kesetaraan dan tidak adanya stereotip negatif bagi disabilitas di keraton juga diamati penulis pada saat mengisi diskusi budaya dalam rangka 100 tahun bertahta Sri Sultan Hamengku Buwono ke-X. Mayoritas lurah kantor keraton yang hadir dalam diskusi tersebut baru menyadari bahwa *palawija* adalah seorang yang disabilitas. Mereka lebih akrab dengan pemahaman mengenai kesaktian yang dimiliki *palawija* daripada kekurangan yang ada (Observasi, 17 Maret 2019). Bahkan salah seorang Kanjeng yang bertugas di widyabudaya (perpustakaan arsip naskah-naskah kuno keraton) cenderung membedakan *palawija* dan disabilitas (Kanjeng Wasta, wawancara, 15 Februari 2019), padahal mereka adalah dua orang yang sama-sama memiliki perbedaan kemampuan secara fisik. Ini tentunya memperkuat argumen penulis bahwa kesetaraan dan optimisme di keraton sangat dijunjung tinggi, daripada berusaha meminggirkan disabilitas dari lingkungan sosial.

F. Kesimpulan

Dari beberapa penelitian mengenai antropologi dan disabilitas yang ditemukan selama ini, termasuk yang sudah penulis paparkan di bagian pendahuluan, penelitian mengenai *Palawija-Cebolan* tentunya membawa angin segar bagi dunia disabilitas. Faktanya, disabilitas tidak selalu diliankan dan dipisahkan dari masyarakat. Keraton bahkan telah menunjukkan penghargaan terhadap disabilitas secara turun temurun hingga saat ini.

Secara tradisional mereka memang dianggap sakti, dihargai dan dihormati di lingkungan Keraton Yogyakarta. Akan tetapi, penulis melihat ada tujuan yang lebih tinggi lagi yang dipikirkan oleh Sultan, yakni humanisme. Hal tersebut terlihat dari pemberdayaan *Palawija-Cebolan* di keraton sebagai abdi dalem. Kendatipun sebagai abdi dalem, Sultan telah menyejahterakan mereka dengan memberikan upah yang lebih tinggi daripada abdi dalem lainnya serta memberikan rumah bagi mereka. Sultan juga memperingatkan putra mahkota yang akan diangkat menjadi raja untuk selalu mengingat *kawula alit*, mereka harus diberikan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Inilah yang menyebabkan adanya kenyamanan dan kedamaian bagi abdi dalem *palawija* untuk tetap tinggal di lingkungan Keraton Yogyakarta. Mereka lebih memilih terus mengabdikan dirinya menjadi abdi dalem daripada tinggal di lingkungan luar keraton yang dianggap kurang dapat memberikan kedamaian.

Praktik, adat kebiasaan, dan nilai-nilai yang memanusiakan disabilitas di keraton, tentunya perlu kita adopsi dan mulai tanamkan di lingkungan luar keraton. Seperti perasaan setara, gotong royong, bertutur bahasa yang lembut, dan menganggap disabilitas sebagai *kanca* (teman atau saudara).

G. Pengakuan

Artikel ini disusun berdasarkan sebagian data yang diambil untuk keperluan menyelesaikan tesis. Pembahasan bersifat khusus mengenai praktik *othering* bagi disabilitas di lingkungan keraton yang tentunya berbeda dengan keseluruhan rencana tesis penulis.

H. Referensi

- Ablon, Joan, (1995) "The Elephant Man' as 'Self' and 'Other': The Psycho-Social Costs of A Misdiagnosis", *Sot'. Sci. Med.* Vol. 40. No. 1. pp. 1481-1489.
- Barnes, Colin and Geof Mercer (2003) *Key Concepts Disability*. Cambridge CB2 IUR, UK: Polity Press.

- Brons, Lajos, (2015) *"Othering an Analysis"* Transience Vol. 6 Issue 1.
- Carey, Peter (2014) *"A mischievous young rogue and a dwarf': Reflections on the role of the panakawan in the Age of Prince Diponegoro (1785-1855)"*, Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1 Issue 1 pp. 71-75.
- Endraswara, Suwardi (2015) *Etnologi Jawa*. Yogyakarta: CAPS.
- Ingstad, Benedicte and Susan Reynolds Whyte, (1995) *Disability and Culture* (London: University of California Press.
- Kasnitz, Devva, dkk, (2001) *"Introduction: Anthropology in Disability Studies"*, Disability Studies Quarterly Summer, Volume 21, No. 3.
- Maftuhin, Arif (2016) *"Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas"*, INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, h. 139-162 DOI: 10.14421/ijds.030201
- Mead, George Herbert (1967) *Mind, Self and Society*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Pritchard, E. (2017) *"Cultural Stereotypes and Personal Beliefs about Individuals with Dwarfism"*. The Journal of Social Psychology 153 (1).
- Ro'fah, (2015) *"Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur,"* SIGAB: Jurnal Disabilitas, Vol. 2, No. 2.
- Sayekti, D. Muthia, (2018) *"Menjadi Bintang atau Binatang Analisis Wacana "Othering" dalam Film The Greatest Showman"*, Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, vol. 13, no. 2, pp. 100-109, Dec.
- Shakespeare, T., S. Thompson dan M. Wright, (2010) *"No Laughing Matter: Medical and Social Experiences of Restricted Growth"*, Scandinavian Journal of Disability Research, 12 (1).
- Soelarto, B. (1993) *Garebeg di Kesultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tohari, Slamet (2013) *"Disability in Java: Contesting Conceptions of Disability in Javanese Society After The Suharto Regime"*, LAP Lambert Academic Publishing.
- Tohari, Slamet (2012) *"Habis Sakti, Terbitlah Sakit: Berbagai Macam Konsepsi Difabel di Jawa"* Makalah Diskusi Komunitas Salihara.
- Yeh, Christine J and Noah Borero, (2012) *"School as a Context for "Othering" Youth and Promoting Cultural Assets"* Teachers College Record, February.
- Wawancara dengan Kanjeng Darya, pada Jum'at, 15 Februari 2019 pukul 09.00-10.00 WIB.
- Wawancara Kanjeng Suryo, pada Minggu, 21 Oktober 2018 pukul 12.30 WIB.
- Wawancara Kanjeng Wasta, pada Jum'at, 15 Februari 2019 pukul 09.00-10.00 WIB.
- Wawancara Romo Ranjana pada Minggu, 02 Juni 2019 pukul 10.30-11.30 WIB.
- <http://indonesiaetc.com/albinos-dwarves-and-royalty-the-magic-of-java/> diakses pada 31 Juli 2019 pukul 20.00 WIB.
- <http://www.remotivi.or.id/amatan/508/disabilitas-dalam-game-of-thrones> diakses pada Jumat 22 November 2019 pukul 19.00-20.30 WIB.
- <https://historia.id/kuno/articles/palawija-pengiring-kesayangan-raja-jawa-PyJeR> diakses pada Kamis, 22 Juni 2019 pukul 11.00-13.00 WIB.